



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II PENILAIAN RISIKO .....</b>	<b>4</b>
A. Penilaian Risiko .....	4
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	5
C. Hasil Analisis Risiko .....	21
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan dan Celah dari pengendalian yang sudah ada .....	24
<b>BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penilaian Risiko Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Penilaian Risiko Dinas Kelautan dan Perikanan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA PD Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Laporan Penilaian risiko Dinas Kelautan dan Perikanan ini mencakup identifikasi terhadap Risiko Strategis Organisasi, Risiko Operasional Organisasi, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian. Laporan ini merupakan hasil dari Proses penilaian risiko strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat pengaturan budaya sadar risiko, struktur pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah berkontribusi hingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Semoga laporan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis bagi masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

Risiko merupakan Kemungkinan terjadinya peristiwa/kejadian yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Organisasi OPD juga memiliki kemungkinan terpapar oleh risiko, baik atas tujuan/sasaran strategis OPD, sasaran strategis perangkat daerah dan juga sasaran operasional perangkat daerah. Risiko-risiko tersebut harus dikelola agar OPD memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut perlu disusun kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan *aplicable*. Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pengelolaan risiko menjadi budaya sadar risiko yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pengambilan keputusan organisasi dari level tertinggi hingga yang terendah.

Pengelolaan risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi mengelola risikonya, maka semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya dan tata kelola pemerintahan juga diharapkan semakin baik untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

### A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan risiko OPD adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh OPD, baik sasaran strategis OPD, sasaran strategis perangkat daerah, dan sasaran operasional perangkat daerah.

OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan berdampak atau mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dan akan terus melaksanakan pengelolaan risiko yang meliputi pembangunan budaya risiko, sistem pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko yang merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kebijakannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Proses pengelolaan risiko Strategis OPD yang dituangkan dalam Laporan penilaian Risiko ini, mencakup evaluasi efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi dan analisis risiko, dan respon (rencana tindak pengendalian) atas kelemahan Lingkungan Pengendalian dan penanganan risiko strategis OPD.

Dengan dilakukannya proses dan penyusunan laporan penilaian risiko strategis OPD ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi OPD untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan menindaklanjuti rencana tindak pengendalian yang dibuat sehingga tujuan dan sasaran strategis OPD dapat tercapai.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.375/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan proses pengelolaan dan penilaian Risiko Strategis OPD adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan lingkungan pengendalian dan

risiko-~~risiko~~-risiko strategis OPD sehingga dapat ditentukan upaya untuk perbaikan/penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian instansi pemerintah sehingga tujuan dan sasaran strategis OPD dapat tercapai.

## D. Ruang Lingkup

Proses penilaian risiko strategis OPD meliputi:

### 1. Identifikasi risiko

Mencakup identifikasi risiko-~~risiko~~ yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap tujuan strategis OPD, serta kelengkapan atribut risiko strategis OPD lainnya, seperti kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, , sumber risiko, dan penerima dampak risiko.

### 2. Analisis risiko

Mencakup pemberian skor tingkat kemungkinan, tingkat dampak dan tingkat/level risiko, mengevaluasi pengendalian yang ada, memvalidasi risiko, dan menyusun dan menyelaraskan rencana tindak pengendalian untuk perbaikan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, beserta rencana informasi dan komunikasi serta pemantauannya.

## BAB II

### PENILAIAN RISIKO

#### A. Penilaian Risiko

##### 1. Kriteria Penilaian Risiko

Skala penilaian risiko yang digunakan dalam penilaian risiko strategis OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Skala Dampak

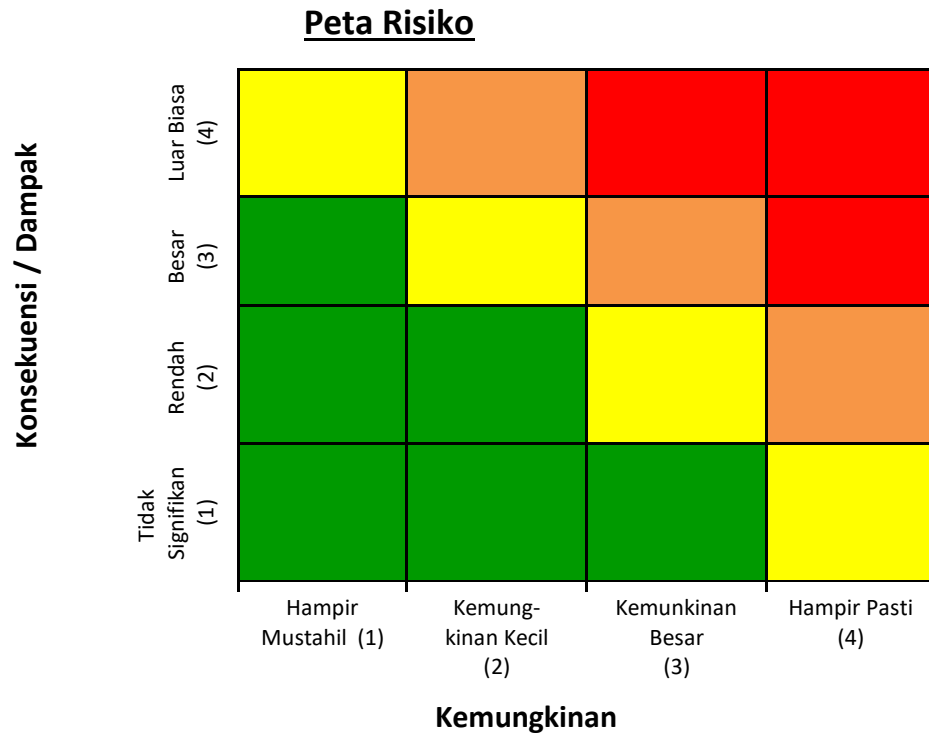
Rating	Kategori	Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam Organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

##### b. Skala Kemungkinan

Rating	Kategori	Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan Kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

##### c. Skala Penerimaan Nilai Risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan



## B. Hasil Identifikasi Risiko

Daftar risiko OPD berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan pada risiko Strategis OPD (Program) dan risiko Operasional OPD (sub kegiatan), dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Risiko Strategis OPD (RSO)

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	KODE RISIKO
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan			
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Menurunnya produktivitas perikanan	RSO.24253301
4			Terganggunya pasokan pakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan	RSO.24253304
5			Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perikanan	RSO.24253305



6			Kegagalan infrastruktur atau teknologi yang digunakan dalam budidaya ikan	RSO.24253306
9			Overfishing dapat menyebabkan penurunan populasi dan kerugian ekosistem	RSO.24253309
10			Terjadinya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing), serta praktik destructive fishing	RSO.24253310
13			Menurunnya profitabilitas hasil perikanan	RSO.24253313
14			Berubahnya kebijakan atau regulasi pemerintah dalam industri perikanan	RSO.24253314
15			Kegagalan sistem teknologi pengawasan	RSO.24253315
17			Respons negatif dari masyarakat terhadap upaya pengawasan perikanan	RSO.24253317
18			Kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan	RSO.24253318
19			Kehilangan atau akses tidak sah terhadap data pengawasan	RSO.24253319
20			Keterbatasan koordinasi antara lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan	RSO.24253320
21			Ketidakmampuan mengidentifikasi pelanggaran	RSO.24253321
22	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Jumlah Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	Fluktuasi harga pasar global atau permintaan konsumen yang tidak stabil	RSO.24253322
23			Kontaminasi atau kualitas rendah dari	RSO.24253323

			produk perikanan dapat merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen	
24			Gangguan dalam rantai pasokan atau masalah logistik dapat mengakibatkan keterlambatan pengolahan dan distribusi produk	RSO.24253324
26			Kurangnya keterampilan atau kekurangan tenaga kerja dapat mempengaruhi efisiensi proses pengolahan	RSO.24253326
27			Kontaminasi atau penyimpangan dalam praktik keamanan pangan dapat merugikan kesehatan konsumen dan reputasi produk	RSO.24253327
28			Dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari proses pengolahan	RSO.24253328
	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola		
29		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Degradasi ekosistem dan biodiversitas	RSO.24253329
30			Persaingan antara berbagai kepentingan penggunaan lahan di wilayah pesisir (konflik penggunaan lahan)	RSO.24253330
31			Respons negatif dari masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan pengelolaan	RSO.24253331

			wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
32			Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu laut atau cuaca ekstrem	RSO.24253332
33			Keterbatasan dana untuk mendukung program pengelolaan kelautan	RSO.24253333
34			Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi implementasi program	RSO.24253334
35			Kegagalan teknologi atau infrastruktur yang digunakan dalam pengelolaan kelautan	RSO.24253335

## 2. Identifikasi Risiko Operasional OPD (ROO)

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	KODE RISIKO
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tahap Perencanaan :Perubahan kondisi lingkungan laut yang tidak terduga	ROO.24253301
2			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian perizinan	ROO.24253302
3			Tahap Pelaksanaan :Keterlambatan atau masalah konstruksi dan instalasi infrastruktur pembudidayaan ikan di laut	ROO.24253303
4			Tahap Pelaksanaan :Ketidakstabilan fondasi prasarana pembudidayaan ikan di laut	ROO.24253304
5			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengelola Risiko Lingkungan	ROO.24253305
6			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan teknologi	ROO.24253306

7			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253307
8	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian perizinan dan regulasi	ROO.24253308
9			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian anggaran	ROO.24253309
10			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24253310
11			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Melibatkan Pemangku Kepentingan	ROO.24253311
12			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Teknologi	ROO.24253312
13			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Melibatkan Masyarakat Lokal	ROO.24253313
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Tahap :		
14	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Finansial	ROO.24253314
15			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Lahan atau Ruang	ROO.24253315
16			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Teknologi yang Tepat	ROO.24253316
17			Tahap Pelaksanaan :Masalah Konstruksi dan Instalasi	ROO.24253317

18			Tahap Pelaksanaan :Ketidakstabilan Bahan Bangunan	ROO.24253318
19			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakpastian Dampak Lingkungan	ROO.24253319
20			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253320
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tahap :		
21	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Finansial	ROO.24253321
22			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Lahan atau Ruang	ROO.24253322
23			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Teknologi yang Tepat	ROO.24253323
24			Tahap Pelaksanaan :Masalah Konstruksi dan Instalasi	ROO.24253324
25			Tahap Pelaksanaan :Ketidakstabilan Bahan Bangunan	ROO.24253325
26			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakpastian Dampak Lingkungan	ROO.24253326
27			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253327
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas	Tahap :		

	10 GT sampai dengan 30 GT			
28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253328
29			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24253329
30			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Teknologi dan Sistem Informasi	ROO.24253330
31			Tahap Pelaksanaan :Kesalahan Administrasi	ROO.24253331
32			Tahap Pelaksanaan :Ketidaksetaraan Penegakan Hukum	ROO.24253332
33			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Melibatkan Pemangku Kepentingan	ROO.24253333
34			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24253334
35			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Menanggapi Perubahan Lingkungan	ROO.24253335
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Tahap :		
36	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253336
37			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Lahan	ROO.24253337

38			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Infrastruktur Pendukung	ROO.24253338
39			Tahap Pelaksanaan :Masalah Konstruksi dan Instalasi	ROO.24253339
40			Tahap Pelaksanaan :Ketidakstabilan Geologis	ROO.24253340
41			Tahap Pelaksanaan :Dampak Lingkungan	ROO.24253341
42			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kondisi Lingkungan Selama Operasional	ROO.24253342
43			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Pengaruh Sosial dan Ekonomi	ROO.24253343
44			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253344
45			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengelola Risiko Lingkungan	ROO.24253345
46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253346
47			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Finansial	ROO.24253347
48			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Lahan	ROO.24253348
49			Tahap Pelaksanaan :Masalah Konstruksi dan Instalasi	ROO.24253349
50			Tahap Pelaksanaan :Ketidakstabilan Geologis	ROO.24253350
51			Tahap Pelaksanaan :Dampak Lingkungan	ROO.24253351
52			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kondisi Lingkungan Selama Operasional	ROO.24253352
53			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Pengaruh Sosial dan Ekonomi	ROO.24253353

54			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253354
55			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengelola Risiko Lingkungan	ROO.24253355
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Tahap :		
56	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253356
57			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Teknologi Pengawasan	ROO.24253357
58			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Manusia	ROO.24253358
59			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24253359
60			Tahap Pelaksanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24253360
61			Tahap Pelaksanaan :Pengaruh Eksternal	ROO.24253361
62			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kondisi Lingkungan	ROO.24253362
63			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24253363
64			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengelola Risiko Teknis	ROO.24253364
65	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253365



66			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Manusia	ROO.24253366
67			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Teknologi Pengawasan	ROO.24253367
68			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24253368
69			Tahap Pelaksanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24253369
70			Tahap Pelaksanaan :Pengaruh Eksternal	ROO.24253370
71			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kondisi Lingkungan	ROO.24253371
72			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24253372
73			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengelola Risiko Teknis	ROO.24253373
74	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Pendanaan	ROO.24253374
75			Tahap Perencanaan :Ketidakmampuan Mengidentifikasi dan Melibatkan Pihak Terkait	ROO.24253375
76			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Dukungan Masyarakat	ROO.24253376
77			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Keterampilan dan Kapasitas Anggota POKMASWAS	ROO.24253377
78			Tahap Pelaksanaan :Perlawanan atau Tidak Kooperatif dari Pihak yang Diawasi	ROO.24253378
79			Tahap Pelaksanaan :Ketidakpastian	ROO.24253379

			Keberlanjutan Pendanaan	
80			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengukur Kinerja POKMASWAS dengan Efektif	ROO.24253380
81			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253381
82			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Perubahan dalam Dinamika Lokal	ROO.24253382
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tahap :		
83	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253383
84			Tahap Perencanaan :Ketidakmampuan Mengintegrasikan Data lintas Kabupaten/Kota	ROO.24253384
85			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24253385

86			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24253386
87			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Keterampilan dan Kapasitas Tim Pengawasan	ROO.24253387
88			Tahap Pelaksanaan :Ketidakpastian Pemahaman Lokal	ROO.24253388
89			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengukur Kinerja secara Terintegrasi	ROO.24253389
90			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253390
91			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Perubahan dalam Dinamika Lokal	ROO.24253391
92	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253392
93			Tahap Perencanaan :Ketidakmampuan Mengintegrasikan Data Lintas Daerah	ROO.24253393
94			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24253394
95			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24253395
96			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Keterampilan dan Kapasitas Tim Pengawasan	ROO.24253396

97			Tahap Pelaksanaan :Ketidakpastian Pemahaman Lokal	ROO.24253397
98			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengukur Kinerja secara Terintegrasi	ROO.24253398
99			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24253399
100			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Perubahan dalam Dinamika Lokal	ROO.24253310
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tahap :		
101	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253310
102			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Keuangan	ROO.24253310
103			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Dukungan Industri dan Masyarakat	ROO.24253310
104			Tahap Pelaksanaan :Ketidaksesuaian Metode Pemantauan dan Evaluasi	ROO.24253310

105			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengatasi Ketidakpatuhan Pelaku Usaha	ROO.24253310
106			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Keterampilan Tim Pelaksana	ROO.24253310
107			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengukur Dampak Secara Komprehensif	ROO.24253310
108			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Perubahan Kondisi Lingkungan atau Teknologi	ROO.24253310
109			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Perubahan dalam Kebijakan	ROO.24253310
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tahap :		
110	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24253311
111			Tahap Perencanaan :Ketidakcocokan Prioritas Daerah dengan Kebijakan Pusat	ROO.24253311
112			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Sumber Daya Keuangan	ROO.24253311
113			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Melibatkan Masyarakat Lokal	ROO.24253311
114			Tahap Pelaksanaan :Ketidakcocokan Strategi Pengelolaan dengan Kondisi Lokal	ROO.24253311

115			Tahap Pelaksanaan :Konflik Pemanfaatan Sumber Daya	ROO.24253311
116			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengukur Dampak secara Komprehensif	ROO.24253311
117			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Perubahan dalam Kebijakan Pusat	ROO.24253311
118			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Memelihara Kondisi Lingkungan	ROO.24253311
119	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Prediksi Bencana	ROO.24253311
120			Tahap Perencanaan :Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Teknis	ROO.24253312
121			Tahap Perencanaan :Ketidakmampuan Melibatkan Masyarakat Lokal	ROO.24253312
122			Tahap Pelaksanaan :Kesulitan Akses dan Logistik	ROO.24253312
123			Tahap Pelaksanaan :Ketidakterediaan Sumber Daya Manusia Terlatih	ROO.24253312
124			Tahap Pelaksanaan :Tingkat Kesulitan dalam Koordinasi antara Lembaga	ROO.24253312
125			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Menilai Efektivitas Rencana	ROO.24253312

126			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Keterlambatan Penyempurnaan Rencana	ROO.24253312
127			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Kurangnya Sistem Peringatan Dini yang Efektif	ROO.24253312
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Tahap :	
128	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tahap Perencanaan :Ketidakcocokan Prioritas dengan Kebutuhan Lokal	ROO.24253312
129			Tahap Perencanaan :Keterbatasan Sumber Daya Finansial	ROO.24253312
130			Tahap Perencanaan :Ketidakpastian Dukungan Politik dan Komitmen Pemerintah	ROO.24253313
131			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengakomodasi Keanekaragaman Kultural dan Sosial	ROO.24253313
132			Tahap Pelaksanaan :Ketidakterersediaan Tenaga Kerja yang Terlatih	ROO.24253313
133			Tahap Pelaksanaan :Ketidakmampuan Mengelola Konflik Internal	ROO.24253313
134			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan dalam Mengukur Dampak	ROO.24253313
135			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan Mengatasi Tantangan yang Muncul	ROO.24253313

136			Tahap Pemantauan dan Evaluasi :Ketidakmampuan dalam Menyediakan Umpan Balik yang Konstruktif	ROO.24253313
-----	--	--	---	--------------

## C. Hasil Analisis Risiko

Hasil analisis risiko yang dilakukan melalui FGD dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode	Nilai	Nilai	Tingkat Risiko
1	Strategis OPD				
1,1	Menurunnya produktivitas perikanan	RSO.24.25.33.01	4	4	16
1,9	Overfishing dapat menyebabkan penurunan populasi dan kerugian ekosistem	RSO.24.25.33.09	3	3	9
1,10	Terjadinya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing), serta praktik destructive fishing	RSO.24.25.33.10	3	3	9
1,14	Berubahnya kebijakan atau regulasi pemerintah dalam industri perikanan	RSO.24.25.33.14	3	3	9
1,15	Kegagalan sistem teknologi pengawasan	RSO.24.25.33.15	3	3	9
1,17	Respons negatif dari masyarakat terhadap upaya pengawasan perikanan	RSO.24.25.33.17	3	3	9
1,21	Ketidakmampuan mengidentifikasi pelanggaran	RSO.24.25.33.21	2	4	8
1,22	Fluktuasi harga pasar global atau permintaan konsumen yang tidak stabil	RSO.24.25.33.22	3	3	9
1,23	Kontaminasi atau kualitas rendah dari produk perikanan dapat merugikan	RSO.24.25.33.23	3	3	9



	reputasi dan kepercayaan konsumen				
1,27	Kontaminasi atau penyimpangan dalam praktik keamanan pangan dapat merugikan kesehatan konsumen dan reputasi produk	RSO.24.25.33.27	2	4	8
1,30	Persaingan antara berbagai kepentingan penggunaan lahan di wilayah pesisir (konflik penggunaan lahan)	RSO.24.25.33.30	3	3	9
1,33	Keterbatasan dana untuk mendukung program pengelolaan kelautan	RSO.24.25.33.33	4	3	12
1,34	Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi implementasi program	RSO.24.25.33.34	4	3	12
2	Operasional OPD				
2,4	Ketidakstabilan fondasi prasarana pembudidayaan ikan di laut	ROO.24.25.33.04	3	3	9
2,5	Ketidakmampuan Mengelola Risiko Lingkungan	ROO.24.25.33.05	3	3	9
2,6	Perubahan teknologi	ROO.24.25.33.06	3	3	9
2,9	Ketidakpastian anggaran	ROO.24.25.33.09	3	3	9
2,10	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24.25.33.10	3	3	9
2,14	Ketidakpastian Sumber Daya Finansial	ROO.24.25.33.14	4	3	12
2,19	Ketidakpastian Dampak Lingkungan	ROO.24.25.33.19	3	3	9
2,20	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.20	4	3	12
2,27	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.27	4	3	12
2,28	Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24.25.33.28	3	3	9
2,34	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.34	3	3	9
2,41	Dampak Lingkungan	ROO.24.25.33.41	3	3	9

2,44	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.44	3	3	9
2,53	Pengaruh Sosial dan Ekonomi	ROO.24.25.33.53	3	3	9
2,60	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.60	3	3	9
2,63	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.63	3	3	9
2,69	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.69	3	3	9
2,70	Pengaruh Eksternal	ROO.24.25.33.70	3	3	9
2,71	Perubahan Kondisi Lingkungan	ROO.24.25.33.71	3	3	9
2,72	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.72	3	3	9
2,78	Perlawanan atau Tidak Kooperatif dari Pihak yang Diawasi	ROO.24.25.33.78	3	3	9
2,81	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.81	3	3	9
2,86	Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24.25.33.86	3	3	9
2,95	Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24.25.33.95	3	3	9
2,99	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.99	3	3	9
2,105	Ketidakmampuan Mengatasi Ketidapatuhan Pelaku Usaha	ROO.24.25.33.10	3	3	9
2,112	Ketidakpastian Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.11	3	3	9
2,115	Konflik Pemanfaatan Sumber Daya	ROO.24.25.33.11	3	3	9
2,119	Ketidakpastian Prediksi Bencana	ROO.24.25.33.11	3	3	9
2,12	Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Teknis	ROO.24.25.33.12	3	3	9
2,123	Ketidakterediaan Sumber Daya Manusia Terlatih	ROO.24.25.33.12	3	3	9
2,129	Keterbatasan Sumber Daya Finansial	ROO.24.25.33.12	3	3	9

2,13	Ketidakpastian Dukungan Politik dan Komitmen Pemerintah	ROO.24.25.33.13	3	3	9
2,132	Ketidakterediaan Tenaga Kerja yang Terlatih	ROO.24.25.33.13	3	3	9

## D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan dan Celah dari pengendalian yang sudah ada

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya, dapat diuraikan rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan atas risiko prioritas, sebagai berikut:

### 1. Risiko Strategis OPD (RSO)

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN
1	Strategis OPD			
1,1	Menurunnya produktivitas perikanan	RSO.24.25.33.01	1. Pemberian bantuan berupa alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan dan bantuan bibit ikan kepada pembudidaya ikan 2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Pengembangan dan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS)	Masih berpeluang produktivitas terjadi penurunan
1,9	Overfishing dapat menyebabkan penurunan populasi dan kerugian ekosistem	RSO.24.25.33.09	Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan, Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan, serta Perizinan Pelaku Usaha Perikanan	masih terdapat kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan
1,10	Terjadinya praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing), serta praktik destructive fishing	RSO.24.25.33.10	Kegiatan pengawasan terpadu	masih ditemukan praktik pengangkapan ikan IUU dan destructive fishing

1,14	Berubahnya kebijakan atau regulasi pemerintah dalam industri perikanan	RSO.24.25.33.14	Peningkatan pemahaman penyelenggara pemerintah, dan sosialisasi perizinan pelaku usaha perikanan	Kegiatan sosialisasi belum menyeluruh
1,15	Kegagalan sistem teknologi pengawasan	RSO.24.25.33.15	Terdapat layanan pengaduan masyarakat	kurangnya teknologi pengawasan perikanan
1,17	Respons negatif dari masyarakat terhadap upaya pengawasan perikanan	RSO.24.25.33.17	Penegakan aturan terkait zona penggunaan lahan di laut	terdapat pihak-pihak yang tidak mengetahui
1,21	Ketidakmampuan mengidentifikasi pelanggaran	RSO.24.25.33.21	Pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan forum koordinasi	masih terdapat POKMASWAS yang belum mengikuti pembinaan dan forum koordinasi
1,22	Fluktuasi harga pasar global atau permintaan konsumen yang tidak stabil	RSO.24.25.33.22	Berperan aktif dalam Satgas Stabilitas Harga Udag	Fluktuasi harga yang pasar global yang sulit dibendung
1,23	Kontaminasi atau kualitas rendah dari produk perikanan dapat merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen	RSO.24.25.33.23	Penerbitan rekomendasi SKP	masih banyak UPI yang belum ber-SKP
1,27	Kontaminasi atau penyimpangan dalam praktik keamanan pangan dapat merugikan kesehatan konsumen dan reputasi produk	RSO.24.25.33.27	Penerbitan rekomendasi SKP	masih banyak UPI yang belum ber-SKP
1,30	Persaingan antara berbagai kepentingan penggunaan lahan di wilayah pesisir (konflik penggunaan lahan)	RSO.24.25.33.30	Pengkajian Dokumen Perubahan Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara	Masih banyak masyarakat belum mengetahui batas/ zona di wilayah pesisir
1,33	Keterbatasan dana untuk mendukung program pengelolaan kelautan	RSO.24.25.33.33	Optimalisasi Penyusunan Renja dan RKA	Pagu anggaran bisa berubah
1,34	Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi implementasi program	RSO.24.25.33.34	Penyusunan dan Penetapan RPZWP3K	perlu adanya penguatan kelembagaan masyarakat

## 2. Risiko Operasional OPD (ROO)

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN
2,4	Ketidakstabilan fondasi prasarana pembudidayaan ikan di laut	ROO.24.25.33.04	Terdapat jasa konsultasi perencanaan pembangunan prasarana pembudidayaan ikan di laut pada tahun sebelumnya	perlu nya pengawasan pada saat pembangunan
2,5	Ketidakmampuan Mengelola Risiko Lingkungan	ROO.24.25.33.05	Terdapat CPCL lokasi pembangunan prasarana pembudidayaan ikan di laut	dampaknya biasanya terlihat setelah operasional
2,6	Perubahan teknologi	ROO.24.25.33.06	Optimalisasi sumber daya yang ada	Masih memerlukan perhatian untuk memenuhi kuota
2,9	Ketidakpastian anggaran	ROO.24.25.33.09	Mengoptimalkan penyusunan RKA	Terdapat keterbatasan pelaksanaan
2,10	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Manusia	ROO.24.25.33.10	Monitoring terhadap pelaku usaha pembudidaya ikan	Perlunya pembinaan langsung kepada pelaku usaha
2,14	Ketidakpastian Sumber Daya Finansial	ROO.24.25.33.14	Pengoptimalan penyusunan RKA dengan pagu anggaran	Ketidakpastian pelaksanaan kegiatan
2,19	Ketidakpastian Dampak Lingkungan	ROO.24.25.33.19	Terdapat jasa konsultasi perencanaan pembangunan prasarana usaha perikanan tangkap	Memerlukan pengawasan dalam proses pembangunan
2,20	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.20	Pembinaan berjenjang sesuai tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku	Masih dimungkinkan terjadi perubahan aturan oleh Pemerintah Pusat
2,27	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.27	Pembinaan berjenjang sesuai tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku	Masih dimungkinkan terjadi perubahan aturan oleh Pemerintah Pusat
2,28	Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi	ROO.24.25.33.28	Sosialisasi aturan ditingkat internal	Pelaku usaha masih banyak belum mengetahui
2,34	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.34	Kegiatan sosialisasi pendaftaran kapal perikanan	masih ada pelaku usaha perikanan yang belum mengetahui
2,41	Dampak Lingkungan	ROO.24.25.33.41	Terdapat dokumen study kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan	Perlu adanya dokumen analisis dampak lingkungan

2,44	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.44	Penentuan prioritas kegiatan oleh Kepala Dinas	Masih terdapat tahapan kegiatan yang belum terlaksana
2,53	Pengaruh Sosial dan Ekonomi	ROO.24.25.33.53	Terdapat dokumen study kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan	masih perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat
2,60	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.60	Pengoptimalan penyusunan RKA dengan pagu anggaran	Ketidakpastian pelaksanaan kegiatan
2,63	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.63	Komunikasi internal dan eksternal	masih ada pelaku usaha perikanan yang belum mengetahui
2,69	Ketidakpastian Ketersediaan Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.69	Penyusunan anggaran yang realistis	kegiatan pengawasan tidak menyeluruh
2,70	Pengaruh Eksternal	ROO.24.25.33.70	Pelaksanaan kegiatan sesuai aturan perundang-undangan	Masih terdapat masyarakat yang melakukan penolakan
2,71	Perubahan Kondisi Lingkungan	ROO.24.25.33.71	Penerapan SOP operasional pengawasan	Masih memungkinkan terjadi ketidaksiapan terhadap perubahan lingkungan
2,72	Perubahan Kebijakan atau Regulasi Selama Proses Monitoring	ROO.24.25.33.72	Komunikasi internal dan eksternal	masih ada pelaku usaha perikanan yang belum mengetahui
2,78	Perlawanan atau Tidak Kooperatif dari Pihak yang Diawasi	ROO.24.25.33.78	Memberikan bantuan sarana pengawasan untuk POKMASWAS	POKMASWAS kurang memahami terkait tugas pokoknya sebagai anggota POKMASWAS
2,81	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.81	Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Belum ada aturan turunan dari perda tersebut
2,86	Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24.25.33.86	Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Penerapan Strategi Preventif, Persuasif, dan Refresif dalam kegiatan pengawasan	Masih perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan
2,95	Ketidakmampuan Mengatasi Perlawanan atau Resistensi	ROO.24.25.33.95	Pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan	Terdapat produk hasil perikanan dari luar Kaltara
2,99	Perubahan Kebijakan atau Regulasi	ROO.24.25.33.99	Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Belum ada aturan turunan dari perda tersebut
2,105	Ketidakmampuan Mengatasi	ROO.24.25.33.10		

	Ketidakpatuhan Pelaku Usaha			
2,112	Ketidakpastian Sumber Daya Keuangan	ROO.24.25.33.11		
2,115	Konflik Pemanfaatan Sumber Daya	ROO.24.25.33.11	Penyusunan dokumen RPZ	Belum ada penanda khusus untuk wilayah konservasi
2,119	Ketidakpastian Prediksi Bencana	ROO.24.25.33.11		
2,12	Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Teknis	ROO.24.25.33.12		
2,123	Ketidakterediaan Sumber Daya Manusia Terlatih	ROO.24.25.33.12		
2,129	Keterbatasan Sumber Daya Finansial	ROO.24.25.33.12		
2,13	Ketidakpastian Dukungan Politik dan Komitmen Pemerintah	ROO.24.25.33.13	Menetapkan program dan kegiatan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam dokumen perencanaan (renstra dan renja PD)	Masih memungkinkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
2,132	Ketidakterediaan Tenaga Kerja yang Terlatih	ROO.24.25.33.13	Mengundang narasumber yang ahli dibidangnya	Perlunya komitmen dari narasumber

## BAB III

### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Rencana Tindak Pengendalian untuk memastikan risiko yang telah disusun untuk dilakukan pengendalian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko tersebut, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif.

Rancangan pemantauan yang disusun berdasarkan hasil FGD UPR tingkat OPD, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Risiko Strategis OPD (RSO)

NO.	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN
1	Peningkatan prasarana usaha perikanan tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil serta wilayah perairan darat	Monitoring prasarana usaha perikanan tangkap
2	Penyelenggaraan sosialisasi perizinan guna memaksimalkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur	Sosialisasi Perizinan
3	Penyusunan Dokumen AMDAL rencana pembangunan Mansapa Kab. Nunukan guna meningkatkan pengelolaan pelabuhan provinsi	Penyusunan Dokumen AMDAL
4	Penyediaan operasional fasilitas air tawar (bersih) di Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan	Monitoring penyediaan operasional fasilitas air tawar
5	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Monitoring prasarana pembudidayaan ikan di laut
6	Monitoring, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan	Monitoring kegiatan
7	Himbauan, pemantauan dan pengawasan usaha perikanan tangkap, pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil dan perairan daratan yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.	Himbauan kepada pelaku usaha perikanan
8	Penyelenggaraan sosialisasi perizinan guna peningkatan pemahaman nelayan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur	Sosialisasi perizinan
9	Himbauan, pemantauan, dan pengawasan usaha perikanan tangkap	Himbauan kepada pelaku usaha penangkapan
10	Pembinaan POKMASWAS, Forum Koordinasi dan pengadaan bantuan perlengkapan POKMASWAS, serta pengadaan speedboat pengawasan	Monitoring



11	Himbauan, Pemantauan, dan Pengawasan usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, dan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Himbauan kepada pelaku usaha perikanan
12	Penyelenggaraan sosialisasi perizinan	Sosialisasi perizinan
13	Pengadaan speedboat pengawasan, pembinaan POKMASWAS, dan Forum Koordinasi dan Pengadaan Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	Monitoring pengadaan speedboat pengawasan
14	Himbauan, Pemantauan, dan Pengawasan usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, dan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Himbauan kepada pelaku usaha perikanan
15	Pembinaan POKMASWAS, dan Forum Koordinasi	Monitoring kepada POKMASWAS
16	Meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait	Kolaborasi dengan instansi terkait
17	Pendampingan Penerbitan Rekomendasi SKP dan GMP SSOP	Monitoring kegiatan pendampingan
18	Pendampingan Penerbitan Rekomendasi SKP dan GMP SSOP	Monitoring kegiatan pendampingan
19	Penegakan aturan oleh tim pengawas perikanan	Pengawasan SDKP
20	Penambahan anggaran melalui DAK yang tercermin dalam DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat DAK
21	Kegiatan pelatihan dan pengembangan kelembagaan masyarakat	Kegiatan pelatihan/ sosialisasi kepada Masyarakat

## 2. Risiko Operasional OPD (ROO)

NO.	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN
22	Terdapat Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Reviu DPA
23	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Monitoring terhadap Pembangunan prasarana pembudidayaan ikan
24	Penambahan bantuan prasarana pasca panen untuk proses penjemuran rumput laut	Monitoring prasarana penjemuran rumput laut
25	Melaksanakan kegiatan di tempat yang efisien	Reviu DPA
26	Melaksanakan sosialisasi/ pelatihan pada kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Sosialisasi kepada pembudidayaan ikan
27	Strategi pengadaan yang optimal dari PA/PPK	Rapat internal DKP
28	Terdapat konsultansi pembangunan pengawasan prasarana usaha perikanan tangkap	Reviu DPA
29	Memeriksa semua dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku	Daftar aturan
30	Memeriksa dokumen agar sesuai dengan aturan yang berlaku	Daftar aturan
31	Penyelenggaraan sosialisasi perizinan	Sosialisasi Perizinan
32	Penyelenggaraan sosialisasi perizinan	Sosialisasi Perizinan
33	Penyusunan Dokumen AMDAL	Dokumen AMDAL

34	Memastikan RKA sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan	Asistensi RKA
35	Penyusunan dokumen AMDAL sebagai upaya mencegah dampak lingkungan pada masyarakat	Dokumen AMDAL
36	Pelaksanaan pengawasan dengan perencanaan yang matang	Perencanaan pengawasan
37	Himbauan, pemantauan dan pengawasan usaha perikanan tangkap	Himbauan kepada pelaku usaha perikanan tangkap
38	sharing kegiatan dengan program/kegiatan/sub kegiatan lainnya	
39	Melakukan himbauan, pemantauan, dan pengawasan usaha bidang pembudidayaan ikan	Himbauan kepada pelaku usaha pembudidaya ikan
40	Membuat gugus tugas pengawasan terpadu	Surat Keputusan
41	Melakukan himbauan, pemantauan, dan pengawasan usaha bidang pembudidayaan ikan	Himbauan kepada pelaku usaha pembudidaya ikan
42	Pembinaan terhadap POKMASWAS	Pembinaan
43	Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang masalah utama Pengelolaan Rumput Laut	Draft Usulan Ranperkada
44	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan	Monitoring dan pengawasan
45	Pengawasan terhadap pelaku usaha pemasaran hasil perikanan	Kegiatan pengawasan
46	Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang masalah utama Pengelolaan Rumput Laut	Draft Usulan Ranpekada
47	Pembangunan gapura kawasan konservasi	Monitoring
48	Pembangunan pos jaga kawasan konservasi	Monitoring
49	Melaksanakan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran	Evaluasi Renja
50	Menyediakan honorarium kepada narasumber	Reviu DPA

## **BAB VI PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis OPD ini sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan risiko, yang menginformasikan proses-proses pengelolaan/penilaian risiko strategis OPD, mulai Identifikasi risiko, analisis risiko sampai penyusunan rencana tindak pengendalian.

Laporan ini merupakan bagian integral dari proses pengelolaan risiko yang akan menjadi sumber informasi bagi proses pengelolaan risiko lainnya oleh organ-organ dalam struktur pengelolaan risiko OPD. Bagi UPR Tingkat OPD, laporan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan tindak lanjut perbaikan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, mengelola informasi dan komunikasi serta pemantauan/monitoring rencana tindak pengendalian, memantau keterjadian risiko, serta dasar bagi pelaksanaan evaluasi berkala. Bagi Unit Kepatuhan, laporan ini menjadi instrumen untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan UPR Tingkat OPD dalam melaksanakan pengelolaan risiko.

Laporan ini bukanlah akhir dari suatu proses pengelolaan risiko, sehingga dituntut komitmen dari seluruh jajaran anggota UPR Tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan dan Organ pengelolaan risiko terkait untuk secara konsisten melakukan pengelolaan risiko secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP.

Tanjung Selor,   Maret 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi

